

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas secara rinci mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk mengumpulkan sumber berupa fakta dan data yang berkaitan dengan judul skripsi : “Satuan Polisi Pamong Praja; Sejarah dan Peranan dalam Menjaga dan Memelihara Ketertiban Masyarakat Kota Bandung tahun 1950-2004”.

Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode historis sedangkan tehnik penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Penulis menganggap metode dan penelitian tersebut merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini karena data-data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini secara umum berasal dari masa lampau, dan untuk mengkajinya lebih jauh dapat diperoleh dengan menggunakan metode ini.

Gottschalk (1986:32) mengemukakan bahwa metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Selain itu, metode historis juga merupakan suatu pengkajian, penjelasan, dan penganalisisan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Berdasarkan dengan yang diungkapkan oleh Gottschalk, penelitian ini berupaya untuk mencoba mencari kejelasan atas suatu gejala masa lampau, untuk kemudian menemukan dan memahami kenyataan yang berguna bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan empat langkah penting dalam penyusunan skripsi ini, seperti yang dikemukakan oleh Ismaun (2005:48-50), bahwa metode historis memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan agar proses menguji dan menganalisis fakta dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Heuristik adalah proses mencari dan mengumpulkan jejak atau sumber-sumber tertulis maupun lisan yang berhubungan dengan sejarah dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Pada tahap ini, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber tertulis dan lisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
2. Kritik adalah proses analisis terhadap sumber yang telah diperoleh, apakah sesuai dengan masalah penelitian, baik tertulis maupun lisan. Pada tahap ini dilakukan penyeleksian, baik dengan kritik ekstern maupun kritik intern sehingga mendapatkan fakta sejarah mengenai sejarah dan peranan satuan polisi pamong praja dalam memelihara ketertiban masyarakat di Kota Bandung.
3. Interpretasi adalah proses penafsiran dan penyusunan makna fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan cara menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang sejarah dan peranan satuan polisi pamong praja di Kota Bandung.
4. Historiografi adalah proses penulisan yang utuh dan masuk akal atas intepretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan penemuannya yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

Sedangkan menurut Wood Gray (Sjamsuddin, 2007:69), mengungkapkan paling tidak ada enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu:

1. Memilih topik yang sesuai
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik
3. Membuat catatan tentang itu, apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang di temukan ketika penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluai secara kritis semua evidensi yang telah disimpulkan (kritik sumber)
5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.
6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Perbedaan mendasar dari langkah-langkah dalam metode sejarah yang diungkapkan Syamsuddin tersebut terletak pada tahapan historiografi yang memuat penulisan dan interpretasi sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan, atau dengan kata lain "bersamaan" atau simultan (Syamsuddin, 2007:53).

Dalam upaya merekonstruksi peristiwa sejarah yang menjadi objek kajian, cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari buku dan dokumen serta dilengkapi wawancara dengan narasumber yang relevan dengan masalah yang dikaji. Penggunaan wawancara sebagai tehnik dalam

memperoleh data didasarkan atas pertimbangan bahwa periode kajian penelitian ini masih memiliki kesempatan didapatkannya sumber lisan mengenai latar belakang dibentuknya satuan polisi pamong praja, program kerja, serta sikap masyarakat terhadap kinerja satuan polisi pamong praja itu sendiri. Pertimbangan lain adalah apakah pelaku mengalami, menyaksikan, melihat dan merasakan sendiri peristiwa yang terjadi pada masa lampau khususnya peristiwa yang terjadi pada objek kajian dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mempertajam analisis, penulis juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu sosiologi dan politik.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan skripsi ini dijabarkan menjadi empat kerja penelitian sejarah. Keempat langkah tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan laporan penelitian.

3.1 Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan penelitian ini terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain :

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian

Tahap penentuan dan pengajuan tema penelitian merupakan tahap yang paling mendasar dalam mengawali jalannya penelitian. Dalam tahap ini, penulis terlebih dahulu mengajukan rancangan judul penelitian kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) yang secara khusus menangani masalah penelitian skripsi di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Judul awal yang peneliti ajukan kepada TPPS yaitu *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap*

Penertiban PKL di Kawasan 7 Titik Kota Bandung Tahun 2004-2008. Setelah judul diatas mendapat persetujuan dari TPPS kemudian rancangan penelitian tersebut dipresentasikan dalam seminar proposal pada hari rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah. Dalam seminar penulis mempresentasikan rancangan penelitian tersebut di depan TPPS dan calon pembimbing skripsi untuk dikaji dan didiskusikan apakah rancangan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. seminar tersebut dihadiri oleh Bapak Agus Mulyana, Bapak Ayi Budi Santosa, Bapak Wawan Darmawan, Bapak Tarunasena, dan Ibu Murdiah Winarti. Dalam seminar tersebut, penulis mendapatkan banyak masukan terutama dari calon pembimbing dan dari luar calon pembimbing. Hasil seminar tersebut, menyatakan bahwa judul dari proposal skripsi yang penulis angkat harus diperbaiki kembali karena menurut calon pembimbing I, Bapak Agus Mulyana kajian dalam proposal yang penulis ajukan sangat sempit hanya berkuat pada peranan Satuan Polisi pamong Praja dalam penertiban PKL di kawasan 7 titik saja, padahal dapat diketahui bahwa peran dan tugas dari satuan polisi pamong praja itu sangat luas. Selain itu angka tahun yang dipergunakan penulis dalam penelitian dianggap masih baru. Sama halnya dengan calon pembimbing I, calon pembimbing II yaitu Bapak Wawan Darmawan memberikan masukan agar judul proposal skripsi tersebut diperbaiki sesuai dengan jurusan yang penulis tempuh yaitu pendidikan sejarah.

Dalam seminar tersebut penulis diharapkan untuk memperbaiki judul proposal skripsi dan atas dasar masukan-masukan tersebut akhirnya penulis merubah judul skripsi menjadi *Satuan Polisi Pamong Praja : Sejarah dan*

Peranannya dalam Menjaga dan Memelihara Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004. Setelah itu penulis diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahap penelitian penulisan skripsi. Persetujuan proposal skripsi dinyatakan dengan pengesahan penelitian yang dikeluarkan melalui surat keputusan dari Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung yang ditetapkan dengan surat keputusan dengan Nomor 121/TPPS/JPS/2009, sekaligus penunjukan pembimbing I dan II. Pembimbing I yang ditunjuk adalah Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum, dan Pembimbing II yang ditunjuk adalah Bapak Wawan Darmawan, M.Hum.

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan salah satu langkah awal sebelum melakukan penelitian dan penyusunan laporan penelitian. Rancangan ini merupakan kerangka dasar yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dengan terlebih dahulu melakukan pencarian bahan pustaka dan wawancara sebagai sumber data.

Rancangan ini berupa proposal skripsi yang diajukan kembali pada TPPS. Proposal tersebut pada dasarnya memuat hal-hal berikut:

- a. Judul Penelitian
- b. Latar Belakang Masalah Penelitian
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Penjelasan Judul
- f. Tinjauan Pustaka

- g. Metode dan Teknik Penelitian
- h. Sistematika Penulisan
- i. Daftar Pustaka

Proposal ini kemudian dipertimbangkan dalam seminar proposal dan disetujui setelah dilakukan perbaikan-perbaikan dengan judul *Satuan Polisi Pamong Praja; Sejarah dan Peranannya dalam Memelihara dan Menjaga Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004*

3.1.3 Mengurus Perijinan

Mengurus perijinan dilakukan untuk memperlancar proses penelitian. Perijinan yang dimaksud berbentuk surat keterangan dan surat pengantar kepada personal ataupun instansi yang terkait. Dalam pembuatan surat izin ini, dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari surat pengantar dari jurusan sampai pada Pembantu Dekan I. Setelah mendapatkan pengesahan dari Pembantu Dekan I untuk melakukan penelitian, maka penulis bisa mendapatkan surat izin.

Surat izin penelitian yang penulis buat ditujukan untuk Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Dimana badan ini merupakan badan yang diberi kuasa oleh Walikota Bandung untuk memberikan izin mengadakan penelitian di Kota Bandung. Dari sana penulis mendapatkan surat izin yang ditujukan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Setelah mendapatkan izin melakukan penelitian disana, penulis mendapatkan informasi mengenai satuan polisi pamong praja Kota Bandung karena pada saat itu penulis melakukan wawancara singkat kepada Kepala Biro Perencanaan Program yang bernama Drs Yogiarto. Y, M.si.

3.1.4 Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Perlengkapan penelitian merupakan salah satu aspek yang penting untuk kelancaran proses penelitian. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, perlengkapan penelitian ini harus dipersiapkan dengan baik. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan selama penelitian diantaranya :

1. Surat izin penelitian
2. Instrumen Wawancara
3. Alat Perekam
4. Kamera Foto

3.1.5 Konsultasi

Konsultasi merupakan kegiatan bimbingan penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan pembimbing I dan II yang ditunjuk oleh TPPS. Konsultasi dengan pembimbing memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk memberikan pengarah dalam proses penyusunan skripsi. Hal yang penting dalam penyusunan skripsi ini, karena melalui konsultasi yang teratur akan diperoleh banyak masukan, saran maupun kritik bagi penulis dari pembimbing skripsi. Penulis melakukan konsultasi kepada 2 (dua) pembimbing, yaitu pembimbing I dan pembimbing II. Konsultasi dilakukan dalam rangka menentukan teknik dan waktu pelaksanaan bimbingan, agar bimbingan dapat berjalan efektif dan efisien. Kedua pembimbing ini akan memberikan pengarahan dengan mengkaji permasalahan dan menuliskannya dalam sebuah skripsi. Konsultasi biasanya dimulai dari judul, bab I (pendahuluan), bab II (tinjauan pustaka), bab III (metodologi penelitian), bab IV (pembahasan), bab V (kesimpulan, dan abstrak).

Jadwal konsultasi bersifat bebas dan dalam setiap pertemuan membahas satu bab yang diajukan, revisi, maupun konsultasi sumber. Konsultasi satu bab biasanya tidak cukup satu kali pertemuan karena masih ada kekurangan yang harus ditambah atau diperbaiki oleh penulis. Konsultasi harus dilakukan sampai semua bab selesai dan penulisannya benar.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

3.2.1 Pencarian dan Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik adalah kegiatan dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data mengenai sejarah dan peranan satuan polisi pamong praja Kota Bandung, maka sumber sejarah yang dipergunakan berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis dalam penelitian ini digunakan sebagai pemecahan persoalan yang diteliti, sedangkan sumber lisan digunakan apabila sumber tertulis mengenai permasalahan yang dikaji masih kurang. Oleh karena itu peneliti menjadikan sumber lisan sebagai rujukan karena masih jarang sekali narasumber yang menulis atau mendokumentasikan mengenai sejarah kelembagaan terutama yang terkait dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

3.2.1.1 Pengumpulan Sumber tertulis

Pada tahap ini dilakukan pencarian terhadap berbagai macam sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku-buku, artikel, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dikaji.

Dalam mencari sumber tertulis tersebut, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan baik yang berada di Bandung maupun yang berada di luar Bandung. Adapun tempat-tempat yang penulis kunjungi dalam rangka pencarian dan pengumpulan sumber-sumber tertulis ialah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di perpustakaan ini penulis memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi yang diangkat yaitu mengenai perkembangan kepolisian di Indonesia, khususnya perkembangan polisi pamong praja pada masa VOC hingga awal kemerdekaan, selain itu penulis memperoleh buku lain yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan pamong praja
2. Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD, di perpustakaan ini peneliti memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis angkat mengenai kebijaksanaan politik polisionil yang dilaksanakan oleh polisi pamong praja serta buku yang memuat tentang kedudukan dan tugas dari pamong praja.
3. Perpustakaan IPDN, di perpustakaan ini penulis mendapatkan buku mengenai kepamongprajaan yang dipergunakan penulis dalam mendapatkan informasi mengenai fungsi dan peranan satuan polisi pamong praja
4. Perpustakaan Pusat Angkatan Darat, di perpustakaan ini, penulis mendapatkan sumber yang membahas tentang sejarah pemerintahan Kota Bandung.

Selain mengunjungi perpustakaan yang disebutkan diatas, penelitian juga dilanjutkan dengan mengunjungi instansi pemerintah yang terkait diantaranya yaitu :

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, penulis memperoleh data mengenai Sejarah dan Perkembangan Satpol PP Provinsi Jawa Barat
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, penulis memperoleh data mengenai sejarah, perkembangan serta program kerja yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Bandung

Tahap pengumpulan sumber tertulis ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengklasifikasian terhadap sumber yang telah diperoleh. Adapun pengklasifikasian sumber bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap kontribusi, kekurangan ataupun kelebihan dari sumber tertulis, dan diharapkan dapat membantu penulis dalam melakukan pengkajian pada proses penulisan skripsi ini. Tahap pengklasifikasian ini dilakukan dengan cara memilih dan memilah sumber yang memberikan informasi tentang polisi pamong praja secara umum maupun khusus, sumber yang mengemukakan mengenai sejarah satuan polisi pamong praja, sumber yang memaparkan tentang tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja, dan sumber yang memaparkan tentang hubungan antara satuan polisi pamong praja dengan masyarakat.

Sumber tertulis yang telah terkumpul kemudian dibaca, dipahami dan dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan permasalahan dalam penelitian. Peneliti melakukan pencatatan terhadap berbagai temuan sumber baik daftar

pustaka maupun tema-tema penting yang terdapat dalam sumber tersebut. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam proses penulisan sejarah. Seperti yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2007:154-155) bahwa sejarawan harus langsung membuat catatan (*note talking*) pada alat tulis apapun untuk kemudahan dalam proses penulisan.

3.2.1.2 Pengumpulan Sumber Lisan

Dalam menggali sumber lisan dilakukan dengan teknik wawancara atau interview. Pengertian dari wawancara itu sendiri yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji kepada pihak-pihak sebagai pelaku dan saksi. Menurut Hadari Nawawi (1983:111), interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, secara kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer* atau *information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.

Menurut Kuntowijoyo (2003: 74), teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lisan dari narasumber sebagai pelengkap dari sumber tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi tambahan dari kekurangan atau kekosongan informasi yang ada dari sumber tertulis. Teknik wawancara dilakukan antara pelaku atau saksi dan penulis. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Di mana daftar pertanyaan tersebut dijabarkan secara garis besar.

Pada pelaksanaannya, pertanyaan tersebut diatur dan diarahkan sehingga pembicaraan berjalan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Apabila informasi yang diberikan oleh narasumber kurang jelas, maka penulis mengajukan kembali pertanyaan yang masih terdapat dalam kerangka pertanyaan besar. Pertanyaan-pertanyaan itu diberikan dengan tujuan untuk membantu narasumber dalam mengingat kembali peristiwa sehingga informasi menjadi lebih lengkap.

Dalam pengumpulan sumber lisan ini, peneliti terlebih dahulu membuat instrument penelitian berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Bentuk pertanyaan dalam penelitian ini bersifat wawancara terbuka, dimana pilihan jawaban tidak disediakan. Pertanyaan yang diberikan pun memiliki kriteria pertanyaan yang berbeda, karena disesuaikan dengan jenis profesi yang dimiliki oleh narasumber. Narasumber dapat memberikan jawaban secara terurai sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan baru jika jawaban yang diberikan narasumber dirasakan kurang. Adapun bentuk pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang akan dilampirkan setelahnya.

Para narasumber yang peneliti wawancarai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, yang akan diwawancara mengenai perkembangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dilihat dari berbagai aspek seperti fungsi, peranan, serta hambatan yang dialami dalam menjaga dan memelihara ketertiban di Kota Bandung

2. Kasi Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang akan diwawancarai mengenai program yang telah dijalankan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat Kota Bandung
3. Kasi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang akan diwawancarai mengenai pelaksanaan tugas dari Satpol PP Kota Bandung dalam menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat di Kota Bandung
4. Anggota/ Staf Satuan Polisi Pamong Praja yang akan di wawancarai mengenai tugas dan kewajiban yang dilakukan sebagai anggota Satpol PP serta hambatan-hambatan yang sering terjadi dilapangan dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat
5. Beberapa Masyarakat Kota Bandung yang akan diwawancarai mengenai kedudukan Satpol PP di mata masyarakat yang dilihat dari spesifikasi berikut ini :
 - a. Beberapa pedagang kaki lima yang berada di kawasan 7 titik Kota Bandung
 - b. Beberapa orang pengamen
 - c. Beberapa orang gelandangan dan pengemis
 - d. Beberapa orang masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna fasilitas umum

Untuk lebih jelasnya mengenai narasumber dapat dilihat dari lembar tersendiri dalam daftar narasumber. Teknik wawancara ini berkaitan erat dengan

penggunaan sejarah lisan (*oral history*), seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2003: 28-30) yang mengemukakan bahwa:

“Sejarah lisan sebagai metode dapat dipergunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter. Sebagai metode tunggal sejarah lisan tidak kurang pentingnya jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan sejarah bahkan zaman modern ini yang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan zamannya, tetapi tidak melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh seseorang atau segolongan... selain sebagai metode, sejarah lisan juga dipergunakan sebagai sumber sejarah.”

3.2.2 Kritik Sumber

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan kritik sumber. Menurut Lucey (1984:46) dalam Sjamsuddin (2007:133) terdapat lima pertanyaan yang harus digunakan untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Siapa yang mengatakan itu?
- b. Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah?
- c. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya itu?
- d. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata (*witnes*) yang kompeten, apakah ia mengetahui fakta?
- e. Apakah saksi itu mengatakan hal yang sebenarnya (*truth*) dan memberikan kita fakta yang diketahui itu?

Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat semua data yang diperoleh dari sumber tertulis atau lisan tidak mempunyai tingkat kebenaran yang sama. Kritik sumber merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah terutama karya sejarah, karena hal ini akan menjadikan karya sejarah sebagai sebuah produk dari proses ilmiah itu sendiri yang dapat

dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik sumber bagi sejarawan erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu dalam rangka mencari kebenaran (Sjamsuddin, 2007: 118). Kritik sumber terbagi dalam dua bagian yaitu kritik eksternal dan internal. Tahapan kritik sangat penting dilakukan karena menyangkut verifikasi sumber, untuk diuji tentang kebenaran dan ketepatan sumber-sumber yang akan digunakan. Dengan demikian dapat dibedakan yang benar dan tidak benar, serta yang mungkin dan yang meragukan. Hal ini juga didasarkan atas penemuan dan penyelidikan bahwa arti sebenarnya kesaksian itu harus dipahami, sehingga sumber yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi. Adapun kritik yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

3.2.2.1 Kritik Eksternal

Kritik Eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sjamsuddin (2007:134) mengungkapkan bahwa:

“Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak”.

Kritik eksternal dilakukan guna menilai kelayakan sumber tersebut sebelum mengkaji isi sumber. Kritik eksternal terhadap sumber tertulis bertujuan untuk melakukan penelitian asal-usul sumber terutama yang berbentuk dokumen.

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kritik eksternal terhadap sumber-sumber buku, tidak terlalu mendalam dengan pertimbangan bahwa buku-buku yang penulis pakai merupakan buku-buku hasil cetakan yang didalamnya memuat nama penulis, penerbit, tahun terbit dan tempat diterbitkannya buku tersebut. Sehingga kriteria tersebut dapat dianggap sebagai suatu jenis pertanggungjawaban atas buku yang telah diterbitkan

Peneliti juga melakukan kritik eksternal terhadap sumber lisan yaitu dengan cara mengidentifikasi narasumber apakah mengetahui, mengalami atau melihat peristiwa yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Adapun faktor-faktor yang diperhatikan dari narasumber yaitu dengan cara mempertimbangkan kesehatan mental maupun fisik, kejujuran narasumber, umur, kedudukan, pekerjaan yang dijalankan oleh narasumber apakah berhubungan dengan tema penelitian dan keberadaan dari narasumber sendiri apakah ia pelaku sejarah atau saksi. Proses ini dilakukan karena semua data yang diperoleh dari sumber tertulis maupun sumber lisan tingkat keberadaannya tidak sama.

3.2.2.2 Kritik Internal

Menurut Ismaun (2005:50) kritik internal sumber sejarah yaitu suatu kritik yang dilakukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab, dan moralnya. Kritik internal dilakukan terhadap aspek “dalam” yaitu isi dari sumber atau kesaksian sejarah. Melalui kritik internal ini, sejarawan memutuskan tentang reliabilitas kesaksian tersebut, yakni apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak. Arti sebenarnya

dari kesaksian itu harus dipahami, karena bahasa tidak statis dan selalu berubah, serta kata-kata mempunyai dua pengertian (arti harfiah dan arti sesungguhnya). Selain itu, kredibilitas saksi juga harus ditegakkan.

Kritik internal untuk sumber tertulis dilakukan peneliti dengan melakukan konfirmasi dan membandingkan berbagai informasi dalam suatu sumber dengan sumber lain yang membahas masalah yang serupa, selain itu peneliti juga menentukan sumber yang relevan dan akurat sesuai dengan permasalahan yang dikaji.. Untuk sumber lisan, peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain (*cross checking*) dengan tujuan untuk mendapatkan kecocokan dari fakta-fakta yang berguna untuk meminimalisasi subjektivitas narasumber. Selain itu, peneliti juga melakukan proses perbandingan antara sumber tertulis dengan sumber lisan yang didapat oleh penulis. Tahap ini bertujuan untuk memilah-milah data dan fakta yang berasal dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian.

Adapun kritik internal terhadap sumber lisan dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara antara narasumber yang satu dengan narasumber lainnya sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kemudian dapat bermanfaat untuk menghilangkan unsur subjektivitas dari para narasumber. Seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yogiarto Y,M.si selaku Kasi Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, penulis membandingkannya dengan hasil wawancara kepada Bapak Kusnadi seorang tukang parkir di Kawasan Alun-alun Bandung mengenai upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja

sebagai pemelihara ketertiban umum. Selain itu peneliti pun membandingkannya dengan hasil observasi dan data yang diperoleh sebelumnya, karena tidak semua narasumber akan memberikan informasi yang sama dan dapat diterima sepenuhnya oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran dari fakta yang didapat baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2.3 Penafsiran Sumber (Interpretasi)

Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber sejarah merupakan tahap ketiga dalam metode penulisan sejarah. Interpretasi merupakan tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta yang terkumpul dengan mengolah fakta setelah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi pendukung peristiwa yang menjadi kajian peneliti. Pendekatan ini menggunakan pendekatan interdisipliner, maksud dari pendekatan tersebut adalah bentuk pendekatan dalam penelitian sejarah yang menggunakan bantuan disiplin ilmu lain (ilmu sosial) dalam mempertajam analisis kajian (Sjamsuddin, 2007:189).

Pada tahapan ini peneliti berusaha memilah dan menafsirkan setiap fakta yang dianggap sesuai dengan bahasan dalam penelitian. Setiap fakta-fakta yang diperoleh dari sumber primer yang diwawancarai dibandingkan dan dihubungkan dengan fakta lain yang diperoleh baik dari sumber tulisan maupun sumber lisan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sebagian data yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan. Setelah fakta-fakta tersebut dapat diterima dan dihubungkan dengan fakta lainnya maka rangkaian fakta tersebut diharapkan

dapat menjadi sebuah rekonstruksi yang menggambarkan perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peranannya bagi masyarakat Kota Bandung.

Menurut penafsiran penulis berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja memang mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam memelihara ketertiban umum di Kota Bandung, tetapi kenyataan dilapangan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kinerja dari Satpol PP Kota Bandung masih jauh dari ideal dan Satpol PP selalu dianggap sebagai sosok aparat yang sangat arogan. Peneliti menganggap bahwa kondisi ini memang begitu sangat dilematis. Disatu sisi Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki beberapa tugas pokok yang harus ditangani seperti menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum bagi masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada tetapi di lain pihak, masyarakat memiliki berbagai pandangan berbeda berupa pandangan negative dan positif mengenai keberadaan dari Satpol PP di Kota Bandung.

Terlepas dari beberapa permasalahan tersebut, peneliti menganggap bahwa keberadaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kota Bandung seperti penertiban PKL, penertiban bangunan liar, Penertiban PSK, dan penertiban fasilitas umum lainnya. Dan peneliti berharap agar lembaga tersebut bisa menjankan tugas dan fungsi sepenuhnya, dan peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini dirasa sangat penting baik dalam peningkatan kesehjateraan anggota maupun peningkatan kualitas kerja

agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

3.2.4 Penulisan Hasil Penelitian (Historiografi)

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari keseluruhan prosedur penelitian, tahap terakhir ini disebut historiografi. Historiografi merupakan hasil rekonstruksi melalui proses pengujian dan penelitian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005:28-37).

Pada tahap ini peneliti harus mengerahkan seluruh daya pikirannya, seperti yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2007: 153) yaitu:

“Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi”.

Penulisan laporan ini dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi. Laporan tersebut disusun dengan gaya bahasa sederhana, ilmiah dan menggunakan cara-cara penulisan atau teknik penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh UPI. Laporan hasil penelitian ini disusun untuk kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada jurusan pendidikan sejarah FPIPS UPI, sehingga sistematika yang digunakan sesuai dengan buku penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Sistematika laporan ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi beberapa hal diantaranya latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengambil kajian tentang “Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Peranannya dalam Memelihara dan Menjaga Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004”. Agar kajian ini lebih terarah maka dibuat rumusan masalah. Dalam bab ini dijabarkan tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengemukakan penjelasan beberapa sumber kepustakaan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Peranannya dalam Memelihara dan Menjaga Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004”. Belum ada yang membahas lengkap sesuai dengan judul yang penulis angkat, tetapi peneliti menggunakan referensi yang berhubungan dengan kajian. Peneliti menggunakan buku-buku yang membahas tentang pamong praja, pemerintahan Kota Bandung serta yang lainnya. Kajian pustaka sangatlah penting dalam suatu karya ilmiah.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini mengungkap rangkaian kegiatan serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pertama, persiapan penelitian yang terdiri dari pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan penelitian, mengurus perizinan, dan proses bimbingan. Kedua adalah pelaksanaan penelitian yang terdiri dari heuristik (pengumpulan sumber) baik itu sumber tertulis maupun sumber lisan, melakukan kritik sumber baik internal maupun eksternal, penafsiran

atau interpretasi dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan terakhir melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau yang disebut historiografi.

Bab IV Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas dan Peranannya Dalam Lintas Sejarah. Bab ini menguraikan penjelasan hasil penelitian berhubungan dengan latar belakang terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mencakup program kerja dan peranannya bagi masyarakat Kota Bandung serta peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Pembahasan dalam bab ini ditulis berdasarkan sumber tertulis dan hasil wawancara yang diperoleh.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan keseluruhan hasil penafsiran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.